

# Legal Basic Analysis of Unlicensed Futures Options Trading (Online Broker Case Study)

Rizka\* & Rikko Aprianto

Faculty of Law, Muhammadiyah University Surakarta, Jl. Ahmad Yani, Mendungan, Kartasura, Sukoharjo, 57169, Indonesia

## Abstract

The purpose of this study is as follows to determine the mechanism for licensing and regulatory agreements of the parties related to futures options trading and to find out the legal review of futures options trading based on positive law and Islamic law. The approach method used in this study is the normative method, because in this research what will be examined are legal rules, legal principles regarding the legal basis of unlicensed futures options trading (case studies of online brokers). The type of research used is descriptive, namely to describe clearly the legal basis for trading futures options without a permit (online broker case study). The results of the study explain that the provisions regarding the licensing mechanism and the regulation of the agreement of the parties related to futures option trading are explained in Regulation Number 83/BAPPEBTI/Per/06/2010 concerning Procedures for the Implementation of Promotional Activities or Advertising, Training, and Meetings in the Field of Commodity Futures Trading. Any party who violates this provision will be subject to sanctions in accordance with the applicable provisions. For domestic futures companies, their business licenses will be revoked. As for foreign companies, CoFTRA has the right to ask the police to investigate these companies. In fiqh, this futures contract is referred to as a qad salam with "salam object" (al-muslim fih), is called bai'ul benefit (benefit sale and purchase). Determination of margins, in accordance with Surah an-Nisa' Verse 197.

*Keywords:* futures contract, implementation mechanism, legal basis

## 1. Pendahuluan

Era modern saat ini sejalan dengan perkembangan teknologi sehingga menghadirkan berbagai macam alternatif bisnis untuk masyarakat. Perkembangan teknologi terdiri dari aspek finansial yang memberikan kemudahan untuk masyarakat melakukan akses produk keuangan, memudahkan transaksi dan meningkatkan sisi literasi keuangan termasuk diantaranya investasi (Ginatra, 2020). Investasi merupakan hal yang umum dilakukan baik kalangan remaja hingga kalangan orang dewasa. Hadirnya *peer to peer lending* sebagai bisnis baru dalam investasi terkait dengan Reksadana maupun saham memberikan dampak pada perluasan pasar investasi. Investasi menjadi sebuah momok bagi masyarakat untuk menghasilkan ataupun menggerakkan uang menggunakan aksesibilitas teknologi meningkat secara signifikan.

Menurut "Undang-undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Pasal 1 Perdagangan Futures 1 Nomor 1 menjelaskan bagaimana memahami perdagangan berjangka, dengan mengatakan bahwa perdagangan berjangka komoditas atau apa yang disebut perdagangan berjangka adalah segala yang terkait dengan membeli dan menjual komoditas dengan menarik margin dan dengan penyelesaian kemudian berbasis Pada kontrak berjangka, kontrak derivatif Syariah, atau kontrak derivatif lainnya". Berdasarkan penjelasan tersebut maka kesimpulannya adalah bahwa perdagangan berjangka adalah jual-beli komoditi berupa barang, Layanan, hak, kepentingan lain, dan turunan komoditas apa pun yang dapat dijual untuk mengubahnya menjadi kontrak berjangka. Untuk memastikan pelaksanaan transaksi kontrak berjangka, derivatif Syariah, atau kontrak derivatif lainnya, konsumen menaruh sejumlah uang atau aset dengan pialang berjangka, cangkir waktu pada anggota kliring berjangka, atau anggota kliring berjangka di lembaga kliring berjangka.

Dari perspektif investasi, transaksi derivatif dapat dipahami dari sifatnya sebagai cara untuk melindungi nilai dari risiko seperti inflasi, kenaikan suku bunga, risiko pasar, dan lainnya yang menghasilkan penurunan nilai atau harga di

\* Corresponding author.

*E-mail address:* rizka@ums.ac.id

dunia transaksi ekonomi. Nilai-nilai ini termasuk suku bunga, nilai tukar, saham, obligasi, indeks, dan komoditas. Menurut Frank J. Fafozzi (Gunarsa, 2019), transaksi turunan berfungsi sebagai lindung nilai, indikator harga, peran spekulatif, dan model investasi.

Di Indonesia saat ini terdapat perdagangan dengan nama *Binary Option Trading* yang mulai menjadi pusat perhatian tahun 2018. Awal mulanya *Binary Option Trading* tahun 1973 saat itu Chicago Board Of Option Mortgage (CBOE) resmi diluncurkan. Tahun 2008 terjadi *Subprime Mortgage Crisis* di Amerika Serikat sehingga memberikan dampak pada krisis keuangan yang terburuk dalam sejarah. Kondisi saat krisis membuat para investor melakukan terobosan bisnis berupa opsi investasi baru dan menciptakan opsi perdagangan biner. Di tahun yang sama *Securities Exchange Commission* (SEC) memberikan izin atau persetujuan terhadap *Binary Option*.

Kementerian Perdagangan (Kementerian Perdagangan) bertindak kuat karena peningkatan investasi yang melanggar hukum. Pada tahun 2021, Kementerian Perdagangan, melalui Bappebti, telah menutup 1.222 situs web yang terlibat dalam kegiatan perdagangan dan perjudian komoditas yang melanggar hukum yang menyamar sebagai perdagangan setelah melakukan pengawasan dan mendapatkan keluhan publik. Badan Pengawas Perdagangan Futures Kementerian Perdagangan (Bappebti) didedikasikan untuk memantau semua tindakan menggunakan opsi biner dalam perdagangan berjangka komoditas (*opsi biner*). Bappebti dan Kominfo daftar hitam 1.222 domain yang digunakan untuk berjudi dengan dalih situs web perdagangan dan komoditas berjangka selama tahun 2021.

Dari ribuan website tersebut, terdapat 92 domain opsi biner yang diblokir seperti "*Binomo, IQ Option, Olymptrade, Quotex serta platform lain sejenisnya. Bappebti juga memblokir 336 robot trading seperti Net89/SmartX, Auto Trade Gold, Viral Blast, Raibot Look, DNA Pro, EA 50, Sparta, Fin888, Fsp Akademi Pro* serta perusahaan lain yang sejenis". Opsi Perjanjian Binaru dapat dianggap sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, yang mencakup klausa berikut: a) menyetujui mereka yang mengikat diri sendiri; b) kekuatan untuk menetapkan kontrak; c) objek tertentu; dan d) alasan halal. Jika perjanjian tersebut mematuhi semua 4 (empat) Syarat, seperti:

- a. Adanya Kesepakatan.
- b. Kecakapan Bertindak.
- c. Adanya Objek Perjanjian.
- d. Adanya Causa Halal (Ruslan, 2021).

Kedua pihak yang menandatangani perjanjian itu pasti berarti cocok untuk kehendak atau disepakati, disepakati, atau sebagai jangka waktu perjanjian utama. Kedua pihak dalam perjanjian harus memenuhi standar hukum untuk kapasitas. Secara umum, undang-undang menganggap setiap orang yang dewasa atau memiliki pikiran yang sehat untuk menjadi kompeten. Menurut Pasal 1330 KUHPerdata, orang-orang yang tidak mampu membentuk perjanjian meliputi: 1) anak di bawah umur yang belum mencapai usia dewasa; 2) mereka yang diampuni; dan 3) wanita yang sudah menikah yang secara hukum dinyatakan tidak mampu menandatangani komitmen tertentu. Kondisi ketiga adalah item tertentu, yang menunjukkan bahwa hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam hal perselisihan telah disepakati. Menurut kriteria keempat, persyaratan hukum dari suatu perjanjian adalah alasan resmi (Rahim, 2022).

Kerugian di masa depan bagi investor dapat terjadi akibat aktivitas ilegal yang dilakukan oleh aplikasi investasi kontrak berjangka. Ini dapat dihindari oleh Bappebti sebagai badan pengatur untuk perdagangan berjangka komoditas, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Hukum Nomor 10 tahun 2011 yang mengatur perdagangan berjangka komoditas.

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1. Pengertian Kontrak Berjangka

Yang dimaksud dengan "bursa berjangka" adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau fasilitas kegiatan jual beli komoditas berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak dalam Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi. berbagai turunan.

Bursa berjangka adalah perusahaan yang mengoordinasikan aktivitas perdagangan berjangka. Untuk memenuhi persyaratan yang relevan, bursa berjangka adalah entitas yang menawarkan fasilitas serta mengatur dan memantau operasi transaksi di pasar berjangka. Bursa berjangka memiliki kekuatan untuk menetapkan aturan internalnya sendiri untuk melakukan bisnis, termasuk yang harus dipatuhi oleh anggotanya dan peserta lain dalam transaksi.

Regulasi yang mengatur fleksibilitas dalam penciptaan produk, penetapan harga pasar, perdagangan yang kompetitif, dan efektivitas barang yang diperdagangkan merupakan dasar dari perdagangan berjangka komoditas. Agar investor dapat memperdagangkan semua jenis barang dan kontrak yang berbeda di Bursa Berjangka, dapat dibandingkan dengan supermarket untuk investasi. Investor tidak harus memilih bursa yang berbeda atau jenis produk yang berbeda untuk melakukan investasi atau pembelian mereka. Investasi di komoditas berjangka disebut sebagai "one stop shopping" karena beberapa kontrak komoditas dipertukarkan (Sinaga, 2019).

## 2.2. Mekanisme Perjanjian Kontrak Berjangka

Jual beli komoditas dengan penarikan margin dan pembayaran kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya disebut sebagai perdagangan berjangka komoditas, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Perdagangan berjangka komoditas (PBK). memberikan keuntungan bagi perekonomian karena dapat digunakan untuk penemuan harga, lindung nilai, dan penetapan harga. Hal ini juga dapat digunakan untuk menghasilkan harga referensi yang transparan yang akan menjadi tolok ukur harga komoditas global. Selain itu, pelaku korporasi dapat terlindung dari risiko perubahan pasar harga komoditas dengan menggunakan perdagangan berjangka (Litoama, 2018).

Para pemain yang terlibat dalam perdagangan berjangka dapat dikategorikan ke dalam dua kategori utama: a) Pelaku lindung nilai, yang memiliki kepentingan dalam aset referensi dan mencari strategi untuk melindungi aset mereka dari risiko volatilitas harga. b) Spekulasi yang mencari keuntungan; spekulasi ini termotivasi untuk memperoleh keuntungan yang signifikan dengan meramalkan perubahan harga komoditas, membeli pada harga yang lebih rendah, dan kemudian menjual kembali pada harga yang lebih tinggi.

## 2.3. Dasar Hukum Kontrak Berjangka

Kontrak trading future atau Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi atau perdagangan berjangka komoditi. Segala sesuatu yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian komoditas dengan tanggal pengiriman kemudian berdasarkan kontrak berjangka dan opsi pada kontrak berjangka disebut sebagai perdagangan berjangka komoditas (pasal 1 angka 1).

Opsi atau kontrak berjangka termasuk dalam definisi kontrak berjangka karena merupakan bentuk kontrak konvensional untuk membeli atau menjual suatu komoditas dalam jumlah, kualitas, jenis, lokasi, dan waktu penyerahan di masa depan yang telah ditetapkan (pasal 1 angka 4).

Kontrak yang memberi pembeli hak untuk membeli atau menjual kontrak berjangka atas komoditas tertentu pada harga, jumlah, dan waktu tertentu dengan imbalan premium disebut sebagai opsi atau kontrak berjangka (Pasal 1 angka 5). Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) No. 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 Tentang Sistem Perdagangan Alternatif mengatur tentang Kontrak Berjangka Indeks selain Kontrak Berjangka Komoditi. 39 jo. Keputusan Kepala Bappebti Nomor 58/BAPPEBTI/Per/I/2006 Tentang Perubahan Atas Nomor 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 Tentang Tata Niaga Alternatif.

Dalam keputusan tersebut, indeks dan Forex, atau mata uang asing, dipertukarkan. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak masih berlaku dan berlaku jika berhubungan dengan hukum kontrak kita, yang didasarkan pada pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa "semua perjanjian adalah sah secara hukum bagi mereka yang membuatnya.," selama ada produk/barang yang diperdagangkan. Jual beli didefinisikan sebagai "perjanjian di mana satu pihak berjanji untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lain membayar harga yang ditentukan" berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata. Dalam perdagangan komoditas berjangka, terdapat penyelesaian dan pengiriman produk. Karena syarat pembayaran dan penyerahan produk masih dipatuhi, maka hukum kontrak jual beli tetap berlaku dan legal untuk kontrak perdagangan berjangka komoditi.

Aturan terbaru untuk menerapkan perdagangan pasar fisik aset kripto telah diterbitkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 8 Tahun 2021 yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan perdagangan pasar fisik di bursa berjangka, memiliki klausul ini. Dalam aturan ini, Bappebti menetapkan bahwa saat menangani aset kripto di pasar fisik, faktor-faktor tertentu harus dipertimbangkan. Memprioritaskan kepentingan anggota bursa berjangka, perdagangan aset kripto yang sebenarnya, dan melibatkan pengguna aset kripto untuk mendapatkan harga yang transparan dan adil adalah tiga prinsip pertama dari tata kelola perusahaan yang kuat.

#### 2.4. Penyelesaian Hukum Sengketa Perjanjian

Litigasi atau resolusi konflik berbasis pengadilan adalah metode utama yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan bisnis. Pengajuan suatu kasus ke pengadilan negeri merupakan langkah pertama menuju penyelesaian konflik, yang diikuti dengan putusan hakim. Namun, ada metode lain untuk menyelesaikan masalah di luar proses litigasi, seperti non-litigasi. Penyelesaian non-litigasi adalah apa? Penyelesaian secara non-litigasi adalah proses penyelesaian sengketa tanpa menggunakan sistem peradilan atau jalur tradisional lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ada dua opsi penyelesaian sengketa non-litigasi yang tersedia di Indonesia (UU AAPS).

Dari segi bahasa, arbitrase berasal dari istilah latin *arbitrare*, yang menunjukkan kapasitas untuk memutuskan sengketa atas dasar pengetahuan. Arbitrase individu atau sementara (*ad hoc*) adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral. Arbitrase menurut Abdul Kadir adalah penyerahan secara sukarela suatu ketidaksetujuan kepada orang yang berwenang dengan pengertian bahwa putusan arbiter bersifat final dan mengikat. Sementara itu, pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa arbitrase adalah suatu mekanisme bagi para pihak yang bersengketa perdata untuk menyelesaikannya di luar sistem pengadilan biasa berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis.

Kreditur telah mengeluarkan surat panggilan sekurang-kurangnya tiga kali. Kreditur berhak mengajukan gugatan jika somasi itu diabaikan. Dan apakah debitur wanprestasi atau tidak akan diputuskan oleh pengadilan. Panggilan adalah permintaan yang dibuat kepada debitur (debitur) oleh kreditur (debitur) untuk melakukan tindakan sesuai dengan persyaratan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Pasal 1238 dan 1243 KUHPerdata mengatur aturan yang mengatur panggilan ini.

### 3. Metode dan Bahan Penelitian

Teknik pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode normatif karena standar dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur landasan hukum opsi perdagangan tanpa otorisasi akan dipelajari. (studi kasus broker *online*) (Ibrahim, 2016). Jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif* yaitu untuk menggambarkan secara jelas mengenai dasar hukum perdagangan opsi berjangka tanpa izin (studi kasus broker *online*) (Djulaeka dan Rahayu, 2020). Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Maksud dari deskriptif kualitatif adalah penganalisisan data hasil penelitian bahan hukum dipilah dan diolah untuk kemudian disusun secara sistematis dan diuraikan untuk memperoleh gambaran jelas dan juga lengkap mengenai obyek dalam penelitian ini yaitu dasar hukum perdagangan opsi berjangka tanpa izin (studi kasus broker *online*). Berdasarkan penjelasan pada pendahuluan diatas maka peneliti akan melakukan analisis dengan bahan penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimana mekanisme perizinan dan regulasi perjanjian para pihak terkait perdagangan opsi berjangka? 2. Bagaimana tinjauan hukum perdagangan opsi berjangka berdasarkan hukum positif?

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### 4.1. Mekanisme Perizinan dan Regulasi Perjanjian Para Pihak Terkait Perdagangan Opsi Berjangka

Pedagang berjangka dapat memilih pendirian pembeli (posisi panjang) atau penjual (posisi pendek) (posisi pendek). Pembeli menghasilkan uang jika harganya naik karena dia membeli aset dengan diskon. Penjual menghasilkan uang ketika harga aset turun karena dia menjualnya untuk lebih banyak uang. Untuk memulai perdagangan berjangka, akun perdagangan harus dibuka dengan broker berjangka berlisensi. Pialang dengan lisensi untuk menangani saham dan sekuritas lainnya mungkin juga memiliki satu untuk perdagangan berjangka. Pialang berjangka yang berbeda menyediakan sumber daya dan tingkat bantuan pengajaran yang berbeda.

Pialang online dapat menciptakan lingkungan perdagangan praktik sehingga Anda bisa merasa nyaman sebelum terlibat dalam perdagangan langsung. Saat mengevaluasi broker, penting untuk menilai biaya dan komisi mereka, jenis kontrak berjangka yang mereka berikan, kualitas pendidikan dan dukungan yang mereka berikan, platform perdagangan online, setoran minimum yang diperlukan untuk membuat akun, dan batasan margin. Mayoritas orang dewasa berusia di atas 18 tahun diizinkan untuk berdagang di pasar berjangka, meskipun investor pemula harus menghindarinya. Sebelum berpartisipasi dalam kontrak berjangka, peserta baru harus melakukan studi yang luas atau mendaftar dalam kursus.

Volume iklan ilegal untuk barang-barang yang terkait dengan perdagangan berjangka komoditas yang dilakukan oleh partai-partai asing telah meningkatkan kesadaran akan Otoritas Pengatur Perdagangan Futures Komoditas (Bappebti). Mengingat hal ini, kepala Bappebti yang diterbitkan nomor peraturan 83/bappebti/per/06/2010 yang berkaitan dengan cara-cara melakukan promosi atau iklan, pelatihan, dan kegiatan pertemuan di bidang perdagangan berjangka komoditas.

Tujuan utama dari aturan ini adalah untuk menghentikan kemunculan partai asing yang beriklan di Indonesia melalui berbagai acara termasuk seminar, lokakarya, simposium, dan kesempatan terkait di bidang perdagangan komoditas dengan masa depan. Aturan ini menyerukan pengiriman materi promosi atau iklan, materi pelatihan, dan materi pertemuan ke Bappebti oleh pialang berjangka, penasihat berjangka, atau manajemen Pusat Dana Berjangka. Bappebti harus memberikan persetujuannya untuk tindakan ini (Litoama, 2018).

Pedagang berjangka dapat memilih pendirian pembeli (posisi panjang) atau penjual (posisi pendek) (posisi pendek). Pembeli menghasilkan uang jika harganya naik karena dia membeli aset dengan diskon. Penjual menghasilkan uang ketika harga aset turun karena dia menjualnya untuk lebih banyak uang.

Untuk memulai perdagangan berjangka, akun perdagangan harus dibuka dengan broker berjangka berlisensi. Pialang dengan lisensi untuk menangani saham dan sekuritas lainnya mungkin juga memiliki satu untuk perdagangan berjangka. Pialang berjangka yang berbeda menyediakan sumber daya dan tingkat bantuan pengajaran yang berbeda. Pialang online dapat menciptakan lingkungan perdagangan praktik sehingga Anda bisa merasa nyaman sebelum terlibat dalam perdagangan langsung. Saat mengevaluasi broker, penting untuk menilai biaya dan komisi mereka, jenis kontrak berjangka yang mereka berikan, kualitas pendidikan dan dukungan yang mereka berikan, platform perdagangan online, setoran minimum yang diperlukan untuk membuat akun, dan batasan margin. Mayoritas orang dewasa berusia di atas 18 tahun diizinkan untuk berdagang di pasar berjangka, meskipun investor pemula harus menghindarinya. Sebelum berpartisipasi dalam kontrak berjangka, peserta baru harus melakukan studi yang luas atau mendaftar dalam kursus.

Volume iklan ilegal untuk barang-barang yang terkait dengan perdagangan berjangka komoditas yang dilakukan oleh partai-partai asing telah meningkatkan kesadaran akan Otoritas Pengatur Perdagangan Futures Komoditas (Bappebti). Mengingat hal ini, kepala Bappebti yang diterbitkan nomor "peraturan 83/bappebti/per/06/2010 yang berkaitan dengan cara-cara melakukan promosi atau iklan, pelatihan, dan kegiatan pertemuan di bidang perdagangan berjangka komoditas".

Tujuan utama dari aturan ini adalah untuk menghentikan kemunculan partai asing yang beriklan di Indonesia melalui berbagai acara termasuk seminar, lokakarya, simposium, dan kesempatan terkait di bidang perdagangan komoditas dengan masa depan. Aturan ini menyerukan pengiriman materi promosi atau iklan, materi pelatihan, dan materi pertemuan ke Bappebti oleh pialang berjangka, penasihat berjangka, atau manajemen Pusat Dana Berjangka. Bappebti harus memberikan persetujuannya untuk tindakan ini.

Pasal 1320 KUHP, yang harus memenuhi persyaratan sah dari perjanjian yang terdiri dari: a) menyetujui mereka yang mengikat diri sendiri; b) kekuatan untuk menetapkan kontrak; c) objek tertentu; dan d) alasan halal, tidak dipenuhi oleh kontrak berjangka Binomo. Jika suatu perjanjian memenuhi semua 4 (empat) Syarat, itu dianggap sah. Ini termasuk: menyetujui mereka yang mengikat diri. Kamus Indonesia Besar mendefinisikan kesepakatan sebagai kesepakatan atas apa pun. Disiratkan oleh frasa "Setuju mereka yang mengikat diri mereka sendiri" bahwa para peserta perjanjian telah melakukannya secara sukarela dan tanpa paksaan, kesalahan, atau penipuan. Kebutuhan mutlak akan keberadaan kontrak adalah persetujuan para pihak (Syahrani, 1989).

Dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan, yang mengatur pernikahan, kapasitas untuk bertindak untuk menciptakan kesepakatan, kekuatan untuk bertindak atau kemampuan hukum, yang berarti kemampuan untuk melakukan kegiatan hukum, telah dikendalikan. Tindakan yang sah adalah tindakan yang akan memiliki dampak hukum. Secara umum, seseorang dianggap kompeten untuk mengambil tindakan hukum ketika dia adalah orang dewasa, yang didefinisikan telah berusia 21 atau telah menikah bahkan jika mereka belum berusia 21 tahun.

Prasyarat kedua adalah keberadaan objek atau item tertentu, kriteria ketiga untuk legalitas perjanjian, yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut harus tentang topik atau benda tertentu, atau objeknya. "Menurut Pasal 1332 KUHP, Hanya hal-hal yang dapat ditukar dapat menjadi subjek perjanjian, produk yang merupakan objek perjanjian harus menjadi hal-hal yang dapat diperdagangkan. Perjanjian harus mencakup topik item kecil yang telah diputuskan, menurut Pasal 1333 KUHP. Selain itu, selama kuantitas dapat dihitung atau ditentukan setelahnya, fakta bahwa jumlah Baang tidak diketahui atau pasti bukan penghalang".

Penyebab halal (Causa), yang memiliki asal -usul Latin, adalah prasyarat ketiga. Karena itu adalah sesuatu yang memengaruhi orang lain untuk mencapai konsensus. Perjanjian tersebut tidak valid karena melanggar hukum perjanjian karena mengandung faktor non-halal. Karena tidak pernah ada kesepakatan untuk memulai, tidak ada pembenaran untuk meminta agar hakim menegakkan perjanjian wajahnya. Dengan cara yang sama, kesepakatan yang terbentuk tanpa sebab dianggap tidak pernah terjadi atau tidak pernah terjadi.

Kriteria keempat adalah bahwa suatu penyebab dilarang jika melanggar hukum, moralitas, atau ketertiban umum. “Menurut Pasal 1335 KUHP, perjanjian tanpa alasan atau satu yang telah ditetapkan untuk sesuatu yang fiktif atau melanggar hukum adalah lemah. Tidak ada yang lebih dari ketentuan perjanjian yang dimaksud dengan ini. Isi aktual perjanjian adalah apa yang dimaksud ketika sesuatu adalah alasan atau penyebab perjanjian”.

Hanya broker komersial dan broker berjangka yang membayar biaya keanggotaan yang dapat bertransaksi langsung di pasar saham. Namun, investor skala kecil dapat berdagang berjangka dengan mendaftar untuk akun dengan broker berjangka berlisensi. Anda hanya perlu menyetor sebagian (juga dikenal sebagai margin awal) dari seluruh nilai kontrak ke akun berjangka Anda yang rusak untuk membuka posisi pada kontrak berjangka. Pertukaran berjangka menentukan margin awal, yang mungkin antara 4% dan 15% dari seluruh nilai kontrak.

Pertukaran Futures membandingkan harga kontrak berjangka dengan harga pasar terbaru dari aset dasar (Mark-to-Market / dinilai sesuai dengan harga pasar) pada akhir hari perdagangan (Hari Perdagangan). Bergantung pada apakah pedagang menang atau kalah, broker akan menambah atau mengurangi uang dari akun klien. Menurut hukum, Binomo dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan dalam bentuk "Kosten, Schaden en Interressen, yang diuraikan dalam Pasal 1243 KUHP, antara lain. Kerugian yang dapat dicari sebagai kompensasi tidak hanya mencakup biaya yang benar -benar dikeluarkan (*costain*) atau kerugian yang benar -benar diderita oleh debitur (*scaden*), tetapi juga hilangnya laba (bunga), yaitu keuntungan yang disadari jika Siberbat adalah tidak lalai (*winstdenser*)”.

Kerugian yang perlu diganti termasuk yang dapat diperkirakan dan terkait langsung dengan default, yaitu, ada hubungan antara default dan kerugian yang berkelanjutan. 78 Tiga elemen kerugian berikut (yang harus diganti) ditentukan dalam KUHP: Biaya adalah biaya atau kemarahan yang sebelumnya diizinkan oleh suatu pihak (Kosten). b). Kerugian (Schaden) adalah kerugian karena kerusakan pada barang -barang kreditor yang disebabkan oleh kelalaian debitur. c). Bunga (bunga) adalah kerugian yang diperkirakan atau dipersepsikan oleh kreditor sebagai kerugian laba.

#### 4.2. Tinjauan Hukum Perdagangan Opsi Berjangka Berdasarkan Hukum Positif.

Perdagangan berjangka komoditas, sering dikenal sebagai perdagangan berjangka, didefinisikan oleh hukum nomor 10 tahun 2011 karena setiap kegiatan yang melibatkan pembelian dan penjualan komoditas menggunakan margin dan penyelesaian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mendelegasikan pengembangan, arah, peraturan, dan tanggung jawab pengawasan terhadap Badan Pengawas Perdagangan Futures Komoditas sesuai dengan “Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1999 tentang pelaksanaan perdagangan berjangka komoditas”. (Bappebti), dengan tujuan untuk:

- a. Mewujudkan aktivitas perdagangan berjangka yang konsisten, adil, efektif, dan transparan sambil mempertahankan lingkungan yang kompetitif;
- b. Menjaga kepentingan perdagangan berjangka dari semua peserta;
- c. Mewujudkan perdagangan berjangka sebagai lindung nilai terhadap volatilitas harga, alat manajemen risiko, dan metode formulasi harga transparan.

Kontrak Futures Indeks, yang merupakan tambahan dari kontrak berjangka komoditas, dijelaskan dalam “Kepala Keputusan Komoditas Futures Trading Inwastictory Agency (BAPPEBTI) No. 55/Bappebti/KP/I/2005 tentang sistem perdagangan alternatif. Jo. SK Amandemen terhadap Kepala Kepala Bappebti No. 55/Bappebti/KP/I/2005 Mengenai Sistem Perdagangan Alternatif, Kepala Bappebti No. 58/Bappebti/Per/I/2006. Indeks dan forex, atau valuta asing, dipertukarkan dalam keputusan tersebut. Perjanjian yang ditetapkan oleh para pihak masih sah dan berlaku berdasarkan undang -undang kontrak kami, yang didasarkan pada Pasal 1338, paragraf 1, KUHP, yang menyatakan

bahwa semua perjanjian yang dibentuk secara sah berlaku sebagai undang -undang bagi mereka yang membuatnya". (55/BAPPEBTI/KP/I/2005, 2005)

Aturan terbaru mengenai implementasi transaksi pasar fisik aset crypto secara resmi dirilis oleh Badan Pengawas Perdagangan Futures Komoditas (Bappebti). Badan Pengawas Perdagangan Waktu untuk Komoditas Nomor 8 dari 2021 Peraturan tentang Pedoman untuk Implementasi Perdagangan Pasar Fisik di Bursa Futures memiliki klausul ini. Menurut undang -undang ini, Bappebti mengatakan bahwa perdagangan aset crypto di pasar fisik membutuhkan perhatian pada sejumlah faktor. Kepentingan anggota pertukaran berjangka, perdagangan fisik aset crypto, termasuk pelanggan aset crypto untuk memperoleh harga yang transparan dan wajar, diprioritaskan sebagai bagian dari konsep tata kelola perusahaan yang sehat. Kemudian, fokuslah pada tujuan menciptakan pasar fisik untuk aset crypto sehingga harga dapat dibentuk secara transparan, fasilitas serah terima fisik dapat disediakan, dan pasar ini dapat berfungsi sebagai referensi harga di pertukaran berjangka.

Hanya orang yang memiliki izin/bisnis dari Bappebti yang dapat memperdagangkan kontrak berjangka di pasar saham, dan mereka harus melakukannya sesuai dengan semua undang -undang dan aturan pertukaran yang relevan. Mereka tidak dapat terlibat dalam kontrak istilah secara langsung di bursa; Sebaliknya, mereka harus menggunakan pialang berjangka yang merupakan anggota pertukaran. Ini dapat berinvestasi dalam perdagangan berjangka melalui pialang berjangka selain dana berjangka, yang merupakan peserta. Manajer Pusat Dana, yang bertugas mengawasi portofolio investasi pusat dana, mengawasi pusat dana.

Penjualan dan pembelian kontrak berjangka menciptakan pasar berjangka. Kontrak berjangka adalah perjanjian pembelian untuk barang (komoditas) yang telah dipesan, yang harga telah disepakati sebelumnya, dan yang akan dikirimkan nanti. Kontrak berjangka ini dikenal sebagai salam AQAD di Fiqh, dan "objek salam" (*Al-Muslam Fih*) disebut sebagai komoditas seperti makanan, emas, dan mata uang asing yang sering mengalami perubahan (harga naik dan turun). Nilai tukar rupiah versus dolar atau sebaliknya dapat berfluktuasi karena bencana, peristiwa politik, dan faktor -faktor lain, seperti yang dikenal dengan harga dan down komoditas. Istilah "lingkungan bisnis" mengacu pada keadaan ini.

Perlu diketahui bahwa undang -undang pendirian perdagangan berjangka ini dilarang karena dua alasan: (Kennedy & Sinaga, 2019)

- 1) Karena transaksi hibrida, juga dikenal sebagai judul al-UQ Murakkabah, melibatkan dua transaksi dalam satu AQAD: penjualan hal-hal yang belum diterima dan penjualan selanjutnya dari barang-barang yang sama seperti sekuritas atau catatan kontrak.
- 2) Perdagangan dalam kontrak berjangka setara dengan perdagangan di Bai'ul Ma'dum, yang memerlukan pembelian dan penjualan produk yang belum diterima oleh penjual tetapi yang masih diwakili oleh nilai kontrak AQAD dan kemudian dijual ke pembeli lain.

Meskipun hukum asal jual beli produk alternatif kontrak berjangka ini adalah haram, namun kalangan fuqaha '*ashriyah* menyatakan boleh karena memperhatikan beberapa alasan (*'illah hukum*) sebagai berikut:

- 1) Sejarah Negara menggunakan kontrak berjangka sebagai tindakan lindung nilai.
- 2) Pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa harga kontrak jangka ditetapkan pada saat AQAD dan pada saat barang -barang dikirimkan. Bappebti melakukan tugas ini, yang digunakan untuk membuat tas jabari. Landasan untuk mengizinkan izin dipertukarkan adalah sifat dari harga ini. Penjualan dan pembelian barang dianggap melanggar hukum karena adanya gharar jika harganya ad hoc, dapat berubah, dan tidak sesuai dengan nilai kontrak di muka.
- 3) Negara dan Perusahaan harus mempertimbangkan Hajyah Maslahah.

## 5. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Mekanisme Perizinan Dan Regulasi Perjanjian Para Pihak Terkait Perdagangan Opsi Berjangka

Akun perdagangan harus dibuka dengan broker berjangka berlisensi. Pialang dengan lisensi untuk menangani saham dan sekuritas lainnya mungkin juga memiliki satu untuk perdagangan berjangka. Menilai biaya dan komisi, jenis kontrak berjangka yang mereka berikan, kualitas pendidikan dan dukungan yang mereka berikan, platform perdagangan online, setoran minimum yang diperlukan untuk membuat akun, dan batasan margin. Peraturan Nomor

83/BAPPEBTI/Per/06/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Promosi atau Iklan, Pelatihan, dan Pertemuan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

b. Ketentuan Hukum Perdagangan Opsi Berjangka Berdasarkan Hukum Positif

Ketentuan hukum perdagangan opsi berjangka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, Pemerintah Nomor 9 tahun 1999 tentang pelaksanaan perdagangan berjangka komoditas”, Keputusan Komoditas Futures Trading Inwastitory Agency (BAPPEBTI) No. 55/Bappebti/KP/I/2005 tentang sistem perdagangan alternatif. Jo. SK Amandemen terhadap Kepala Kepala Bappebti No. 55/Bappebti/KP/I/2005 Mengenai Sistem Perdagangan Alternatif, Kepala Bappebti No. 58/Bappebti/Per/I/2006, Pasal 1338 KUHPperdata.

## References

- Bappebti. (2005). *Sistem Perdagangan Alternatif*. 55/BAPPEBTI/KP/I/2005
- Djulaeka & Devi Rahayu. (2020). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Ginatra, N. L. W. S. R. et. al. (2020). *Teknologi Finansial Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Gunarsa, S. M. (2019). Kontrak Berjangka Komoditas Emas Sebagai Instrumen Transaksi Derivatif dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1), 95–117. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.95-117>
- Ibrahim, J. E. dan J. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kennedy, P. S. J., & Sinaga, M. G. P. S. (2019). Pengaruh Spot Rates dan Forward Rates Terhadap Futures Rates Pada Harga Komoditas Olein di BBJ 2015-2017 Posma. *Jurnal Ilmiah FE-UMM*, 13(1).
- Litoama, F. (2018). Kepastian Hukum Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 9(1). <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v9i1.1176>
- Rahim, A. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori dan Praktik*. Makassar: Humaities Genius.
- Ruslan, M. T. (2021). Hukum Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor. *Katalois*, 4(10).
- Sinaga, P. S. J. K. dan M. G. P. (2019). Pengaruh Spot Rates Dan Forward Rates Terhadap Futures Rates Pada Harga Komoditas Olein Di BBJ 2015-2017. *Jurnal Ilmiah FE-UMM*, 13(1).
- Syahrani, R. (1989). *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.